



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR 100.3.3.4/45 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PENGGUNA
BARANG NOMOR 100.3.3.4/15 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/214 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/22 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan teknis kegiatan penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 100.3.3.4/15 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Nomor. 800/99/2026 Tanggal 29 April 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Sekretaris Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dirubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 100.3.3.4/15 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11), Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 1);

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/508 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/214 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/22 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan meliputi :
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menandatangani bukti pengeluaran belanja atas nama Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan kewenangan yang diberikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah uang muka kerja / panjar diterima;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak Mei 2026.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGRAN / PENGGUNA BARANG
NOMOR 100.3.3.4/45 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG NOMOR 100.3.3.4/15 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	BIRO	NAMA/NIP/JABATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH .	KASUBBAG KEUANGAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
		KASUBBAG SARANA DAN PRASARANA	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	BIRO	NAMA/NIP/JABATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
		KASUBBAG PELAYANAN RUMAH TANGGA	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel

NO	BIRO	NAMA/NIP/JABATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		KASUBBAG TU SEKRETARIS DAERAH	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
			Penyiapan Materi Pimpinan

NO	BIRO	NAMA/NIP/JABATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
		KABAG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
2.	BIRO BUMD DAN BLUD SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	JAROT MULYAWAN, SE, M.Si, Akt 19750206 200903 1 004 Analisis Kebijakan Ahli Muda	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
		ANDRE WAHYU YUDHANTORO, SE, MM 19851029 201012 1 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi

NO	BIRO	NAMA/NIP/JABATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
		ARIADI WIBOWO, SE, MM 19831015 201001 1 020 Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BULD
3.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	MUHAMAD I' TISHOM, S.Si, MT 19730212 200502 1 002 Analisis Kebijakan Ahli Madya	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
		CAHYO WIDI WIBOWO, SE, M.Si 19751012 200003 1 006 Analisis Kebijakan Ahli Madya	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Dra. ENY ROKHISAH, M.Kes 19660928 199303 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Madya	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

NO	BIRO	NAMA/NIP/JABATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
4.	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		HARYONO WIDYASTOMO, SH, MH 19671022 199303 1 006 Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		ZRP. TJ. MULYONO, SH, MH 19670922 198903 1 004 Analisis Hukum Ahli Madya	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
		SRI WAHYUNINGSIH, SH 19691007 199401 2 001 Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	SYAMSUDIN ISNAINI, SSTP, S.H., M.H. 19800717 199912 1 001 Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual

NO	BIRO	NAMA/NIP/JABATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		GUNAWAN SUDHARSONO, SE, SH, M.Si 19690214 199703 1 004 Analisis Kebijakan Ahli Madya	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
		WORO BOEDISAYEKTI, S.Sos, M.Si 19671024 198803 2 007 Analisis Kebijakan Ahli Madya	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

NO	BIRO	NAMA/NIP/JABATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
6.	BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	YASIP KHASANI, S.IP., M.M 197412 199703 1 005 Kepala Biro Biro Organisasi	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
			Penataan Analisis Jabatan
		Drs. JUWANDI, M.Si 19690419 199001 1 001 Analisis Kebijakan Ahli Madya	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		AGUSTINUS AGUS SUDARMANTO,S.STP, MM 19760812 199703 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Madya	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7.		Drs. Edy Iswanto, M.A.P	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO	BIRO	NAMA/NIP/JABATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	19710831 199103 1 003 Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
			Fasilitasi Penataan Wilayah
		Ir. BETTY WULANDARI, M.P 19680925 199403 2 004 Analisis Kebijakan Ahli Madya	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
			Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
		Drs. DANANG CAHYA PERMADI, MM 19700416 199009 1 001 Analisis Kebijakan Ahli Madya	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
8.	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	SARWORINI, S.P.,M.Si 19660718 199401 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Madya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		BAGUS RACHMOYOJATI, S.Pt	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

NO	BIRO	NAMA/NIP/JABATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
		19750523 200312 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Madya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
		SUWARNI DEWI, S.P., M.P	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
		19700928 199803 2 005	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
		Analisis Kebijakan Ahli Madya	
9.	BIRO PENGADAAN BARANG /JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	SETYONUGROHO, S.Kom	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
		19850502 200903 1 004	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Plt Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
		SUDIRMAN, SH, MM	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		19680110 199403 1 005	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

NO	BIRO	NAMA/NIP/JABATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
		Analisis Kebijakan Ahli Madya	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd
SUMARNO



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001